



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM
MELALUI APLIKASI SI DOKUM
(SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI HUKUM)
DI BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NAMA: ROSI ALFON NUGROHO, SH, MH
NIP. : 19820124 200812 1 001
N D H : 17

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Instansi pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai karena kesempurnaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting disetiap organisasi atau instansi pemerintah, dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi dalam era teknologi informasi penyelesaian dokumen produk hukum dan merupakan keharusan dalam upaya untuk melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan Pendokumentasian Produk Hukum Melalui Aplikasi SI DOKUM di Bagian Perundang-Undangan Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan adanya aplikasi dapat mempermudah dalam Pencarian Dokumen menjadi lebih cepat, efektif dan efisien, Kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada pimpinan, Dokumen akan lebih mudah dan cepat di akses kapanpun dan dimanapun, Penghematan terhadap ruang kearsipan/*papperless*, Penghematan investasi berupa kertas, tinta cetak (*printer & fotocopy*), Pemberdayaan SDM, Memperkecil kemungkinan kehancuran data, Pengembangan budaya nilai dan perilaku kerja yang positif, Penyerierhanaan sistem, prosedur, mekanisme dan kontrol kerja yang efektif serta Meningkatkan mutu layanan administrasi.

Tahapan yang telah dilalui adalah dengan memetakan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal, menganalisa stakeholder dengan tujuan agar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap kendala dan masalah dapat diatasi, kemudian membentuk Tim Efektif yang bertugas untuk menyusun dan membangun aplikasi. Pendokumentasian Produk Hukum Melalui Aplikasi SI DOKUM di Bagian Perundang-Undangan Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil